

Petani Didorong Jadi Paralegal

PALANGKA RAYA, KOMPAS — Para petani dari lima desa dan satu dusun di Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mengikuti pelatihan paralegal. Langkah itu dilakukan agar petani mempunyai kemampuan memecahkan konflik agraria dan sosial yang terjadi di desanya sebelum berhadapan dengan hukum.

Mereka diharapkan bisa membela diri saat berhadapan dengan hukum. Banyaknya konflik tanah dan konflik sosial yang muncul menjadi alasan utama mereka mengikuti pelatihan tersebut.

Selain itu, pelatihan juga untuk menguatkan masyarakat akan konflik lahan yang berpotensi terjadi setelah adanya wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah.

"Dengan pelatihan menjadi paralegal, kepekaan hukum masyarakat dibuka. Masyarakat juga diharapkan bisa membela dirinya saat berhadapan

dengan hukum," kata Direktur Borneo Institut (BIT) dan penyelenggara pelatihan, Yaned Jagau, di sela-sela pelatihan, Senin (8/7/2019).

"Jokowi sudah datang ke sana (Kecamatan Manuhing Raya), setelah itu harga tanah naik, spekulasi mulai muncul, pasti akan diikuti oleh konflik. Apalagi sebelumnya, konflik lahan sudah ada," kata Jagau.

Pelatihan berlangsung sejak Minggu, (7/7) hingga Selasa, (9/7). BIT mendatangkan fasilitator dari Yayasan Pena-bulu, yakni George Corputty dan Agung Wijaya.

Pelatihan yang diikuti 70 peserta itu sebagian besar adalah petani, sisanya adalah aparat desa dan guru. Mereka berasal dari Desa Mantuhei, Luwuk Tukau, Tumbang Samui, Tumbang Oroi, dan Dusun Ulek Luang, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya.

Jagau menambahkan, saat ini sebagian besar wilayah ke-

lola masyarakat berada di kawasan hutan. Hal itu menyebabkan rentannya alih fungsi lahan dari hutan ke konsesi perkebunan.

Alas U Ihai (44), salah satu peserta yang juga merupakan mantir adat, mengungkapkan, pelatihan itu menjadi hal baru bagi mereka. Sebab, selama ini ketika ada polisi datang dan bertanya, masyarakat langsung ketakutan.

"Apalagi bilang jadi saksi, bisa keringat dingin. Saat ini kami tahu bahwa ternyata tidak begitu saja bisa langsung jadi tersangka," kata Alas.

Alas mengungkapkan, dalam melakukan penolakan terhadap eksploitasi lahan, dirinya atau warga kerap mendapatkan intimidasi atau ditakut-takuti. Hal itu membuat banyak lahan hilang begitu saja tanpa ganti rugi.

"Penolakan menjadi sia-sia. Masalah lahan memang masih jadi yang paling banyak terjadi," kata Alas. (IDO)